

Penanggulangan Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* di Media Sosial

Putri Juliyanti Magfira Bailusi^{1*}, Nabila Syauqiyah², Anindita Dwi Saputri David³,
Madinatul Munawwarah⁴, Siti Nahdah Fadhillah Anggowa⁵, Rahmatia
Renyaan⁶, Keisya Rafeyfa Asyla⁷, Andini Khaerani Rahim⁸, Salza Risky Wahyudi⁹,
Firmansyah Koesyono Efendi¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Program Studi Teknik Kardiovaskular, Universitas Megarezky
ptrymagfirah@gmail.com *



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 4 Desember 2025

Page: 1697-1709

Article History:

Received: 25-12-2025

Accepted: 27-12-2025

Abstrak : Media sosial mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi saluran utama penyebaran hoaks dan hate speech yang berdampak pada kohesi sosial, stabilitas politik, dan kesehatan psikologis masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penanggulangan hoaks dan hate speech melalui literasi digital, regulasi konten, dan peran aktif masyarakat dalam memverifikasi informasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari jurnal, laporan resmi, dan penelitian terdahulu terkait fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan hate speech dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, algoritma platform yang menonjolkan konten viral, serta faktor sosial dan psikologis pengguna. Strategi penanggulangan meliputi edukasi literasi digital, penggunaan situs cek fakta resmi, regulasi konten oleh pemerintah dan platform, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Hoax; Hate Speech; Media Sosial; Literasi Digital; Penanggulangan

PENDAHULUAN

Media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, X (Twitter), dan YouTube membuat proses berbagi informasi berlangsung sangat cepat dan luas. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi personal, tetapi juga menjadi ruang publik baru tempat masyarakat memperoleh berita, mengekspresikan pendapat, dan membangun jaringan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa

media sosial memfasilitasi proses konstruksi identitas melalui aktivitas *self-presentation*, umpan balik sosial, dan interaksi interpersonal. Penelitian oleh Aulia dan Subarsa Putri (2024) menemukan bahwa Instagram berfungsi sebagai medium bagi remaja untuk membentuk dan mengekspresikan identitas mereka melalui konten yang mereka pilih dan interaksi yang mereka lakukan di *platform* tersebut.

Penelitian oleh Fionda et al. (2025) menunjukkan bahwa berita palsu memiliki pola difusi logis dan temporal yang khas, yang cenderung lebih agresif dibanding berita benar. Melalui analisis logika temporal, mereka menemukan bahwa penyebaran misinformasi cenderung menunjukkan tingkat perluasan jaringan yang lebih cepat dan lebih tidak stabil daripada penyebaran informasi faktual, pola difusi ini tidak terlepas dari karakteristik konten berita palsu itu sendiri, khususnya dalam hal penggunaan *framing* emosional. *Framing* emosional dalam berita palsu tidak hanya meningkatkan persepsi kebenaran, tetapi juga mendorong keinginan pengguna untuk membagikannya. Dengan demikian, elemen sensasional yang menjadi ciri khas *fake news* bukan sekadar faktor konten, tetapi secara psikologis membentuk mekanisme penyebaran melalui aktivasi afektif (Adeeb et al., 2023).

Struktur linguistik konten misinformasi juga berperan penting. Penelitian Sari et al. (2025) menunjukkan bahwa teknik linguistik seperti *presupposition* dan *implicature* sering digunakan untuk membuat berita palsu tampak lebih meyakinkan dan dapat meningkatkan kecenderungan pengguna untuk mempercayai dan menyebarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manipulatif konten *fake news* tidak bergantung pada sensasionalisme, tetapi juga pada cara informasi tersebut dikonstruksi untuk mempengaruhi persepsi pembaca dan juga dapat menyebabkan informasi menyesatkan memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau audiens luas dalam waktu singkat.

Dalam konteks Indonesia, Kominfo (2022) menyatakan bahwa mayoritas *hoax* beredar di *platform* yang memiliki fitur berbagi cepat atau viral, seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Media sosial yang berbasis visual seperti Instagram dan TikTok juga menjadi medium penting dalam penyebaran narasi tertentu, karena konten visual lebih mudah menarik emosi pengguna. Namun, tanpa kesadaran digital yang memadai, media sosial justru dapat menjadi ruang yang rentan terhadap manipulasi informasi, polarisasi, dan konflik sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai media sosial dalam penelitian mengenai *hoax* dan *hate speech* sangat penting untuk melihat bagaimana dinamika komunikasi di dalamnya memengaruhi perilaku dan respons masyarakat terhadap informasi. Penggunaan media sosial berkontribusi pada pembentukan identitas diri serta kemampuan interpersonal mahasiswa. Melalui komunikasi yang terjadi di ruang digital, pengguna belajar memahami persepsi sosial, mengembangkan relasi, dan membangun jejaring yang tidak dibatasi ruang atau waktu. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial telah memperluas konsep “bersosialisasi” dari sekadar interaksi tatap muka menjadi aktivitas digital berlapis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Ramdlani et al., 2024).

Selain itu, media sosial menciptakan perubahan signifikan terhadap cara masyarakat berkomunikasi. Penelitian Azzaakiyyah et al. (2023) menunjukkan bahwa media sosial telah menggeser pola komunikasi tradisional menjadi komunikasi cepat, instan, dan berbasis jaringan. Masyarakat kini lebih mengandalkan *platform* digital untuk bertukar pesan, mencari informasi, hingga melakukan aktivitas sosial.

Hal ini menjadi selaras, karena media sosial menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran informasi yang sangat dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Metode penelitian, *literature review*, memfokuskan kumpulan data dan teori-teori yang berhubungan dengan *hoax* dan *hate speech*. Beberapa penelitian jurnal menunjukkan bahwa paparan informasi palsu secara berulang dapat membentuk opini publik yang keliru, memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat, serta memperbesar konflik sosial di ruang digital maupun dunia nyata. Ujaran kebencian yang dibiarkan berkembang di media sosial juga dapat memperkuat intoleransi dan diskriminasi, sehingga mengancam persatuan dan stabilitas sosial.

Oleh karena itu, penanggulangan penyebaran *hoax* dan *hate speech* di media sosial perlu dilakukan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga memperkuat peran literasi digital, etika bermedia sosial, serta kolaborasi antara pemerintah, *platform* media sosial, dan masyarakat. Jurnal-jurnal terkait menekankan bahwa peningkatan kesadaran kritis pengguna dalam memilah informasi merupakan kunci utama dalam memutus rantai penyebaran *hoax* dan ujaran kebencian di ruang digital.

Pendekatan yang memfokuskan pada pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber pustaka terkait upaya penanggulangan *hoax* dan *hate speech* di media sosial dan juga untuk menganalisis fenomena penyebaran *hoax* dan *hate speech* di media sosial, sekaligus strategi penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif, aktor yang terlibat, serta tantangan dalam pengendalian penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di berbagai *platform* digital. Yaitu sebuah pencarian literatur artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas *hoax*, *misinformation*, *disinformation*, dan *hate speech*. Laporan lembaga/instansi resmi seperti Kominfo dan artikel penelitian dalam basis data seperti Google Scholar dan Mendeley.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren, dampak, serta praktik mitigasi yang telah dilakukan, sehingga memudahkan pemetaan pengetahuan dari berbagai studi ilmiah terkini. Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan menelusuri jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi penelitian yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif paling mutakhir dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial di Indonesia. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi topik, kesesuaian konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia, serta kontribusinya terhadap pemahaman penanggulangan *hoax* dan *hate speech*, baik melalui pendekatan hukum, teknologi, maupun edukasi literasi digital.

Pendekatan *literature review* memungkinkan penelitian ini untuk merangkum berbagai perspektif ilmiah secara menyeluruh, memetakan perubahan dan perkembangan *hoax* serta *hate speech* dari tahun 2020 hingga 2025, serta mengidentifikasi strategi penanggulangan yang efektif dan tantangan yang masih dihadapi. Metode ini juga memberikan dasar teoretis yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, edukasi, dan solusi teknologi dalam menanggulangi *hoax* dan

hate speech di media sosial, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga aplikatif dalam konteks mitigasi informasi negatif di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penyebaran *Hoax* di Indonesia

Fenomena *hoax* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pesat media sosial dan ruang informasi digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *platform* media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan media digital lainnya telah menjadi medium utama dalam penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Tingginya kecepatan distribusi informasi serta rendahnya proses verifikasi konten membuat hoaks mudah tersebar dan sulit dikendalikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan publik, merusak kualitas demokrasi, serta mengancam integrasi sosial di masyarakat Indonesia (Febriansyah & Muksin, 2025). Dalam arus informasi digital yang semakin padat, istilah “hoaks” mengalami pergeseran dan perluasan makna yang signifikan. Hoaks tidak lagi dipahami secara sempit sebagai informasi bohong semata, melainkan sering digunakan untuk merujuk pada berbagai bentuk konten bermasalah, seperti disinformasi, fitnah, propaganda, rumor, hingga satir dan klaim politik yang tidak dapat diverifikasi. Penggunaan istilah yang terlalu luas dan tidak konsisten ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dalam mengidentifikasi informasi yang benar-benar tergolong hoaks. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi makna hoaks melalui pendekatan akademik yang menekankan pentingnya definisi operasional yang jelas dan indikator yang terukur agar literasi digital, edukasi publik, serta strategi penanggulangan informasi palsu dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran (Silalahi & Sevilla, 2025).

Penelitian yang dilakukan Effendi (2023) dalam artikelnya “*User Behaviour and Hoax Information on Social Media Case of Indonesia*” menyoroti bagaimana perilaku pengguna media sosial di Indonesia berkontribusi pada penyebaran informasi palsu. Penelitian ini menemukan bahwa kecenderungan masyarakat untuk membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu menjadi salah satu faktor utama percepatan penyebaran hoaks, terutama pada isu-isu yang dianggap sensitif dan menimbulkan respons emosional. Temuan ini juga menunjukkan bahwa algoritma *platform* media sosial yang mengutamakan konten yang menarik atau provokatif turut mempercepat difusi hoaks karena konten tersebut lebih mudah menarik perhatian pengguna dibanding informasi faktual, sehingga memperbesar dampak sosial dan potensi konflik dalam masyarakat.

Kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat literasi pengguna yang di mana tingkat literasi informasi masyarakat secara signifikan memengaruhi perilaku membagikan hoaks di media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa pengguna dengan literasi informasi yang tinggi cenderung lebih kritis dalam menilai kebenaran konten sebelum membagikannya, serta memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengidentifikasi hoaks. Sebaliknya, individu dengan literasi informasi yang rendah lebih mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan dan cenderung mempercepat penyebaran hoaks. Temuan ini menegaskan bahwa penyebaran hoaks tidak semata-mata disebabkan oleh teknologi atau karakter *platform*, tetapi juga oleh perilaku sosial dan kemampuan individu dalam memilah serta menilai informasi secara kritis, menjadikan literasi informasi sebagai faktor penting dalam upaya mitigasi hoaks di era digital (Kurniasih, Damayani, & Zubair, 2024).

Penelitian ini menyoroiti peran interaksi sosial di media sosial, seperti fitur *share*, *like*, dan komentar, yang dapat memperkuat jangkauan hoaks. Saat informasi yang menimbulkan reaksi emosional atau terkait isu sensitif (politik, kesehatan, agama) tersebar, pengguna cenderung membagikannya tanpa verifikasi, sehingga hoaks cepat menyebar ke jaringan yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan konsep bahwa perilaku “*share* tanpa verifikasi” merupakan faktor krusial dalam percepatan penyebaran hoaks di Indonesia. Media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi arus dominan dalam penyebaran hoaks di Indonesia. Kecepatan distribusi, kemudahan membagikan konten, serta kemampuan menjangkau audiens yang luas membuat media sosial lebih efektif dibandingkan media konvensional seperti televisi, radio, maupun media cetak. Hal ini menyebabkan hoaks lebih cepat tersebar, dan masyarakat cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi, sehingga memperkuat budaya “*share without verification*” (Febriansyah & Muksin 2022).

Menurut laporan Status Literasi Digital di Indonesia 2022 yang disusun bersama oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Katadata *Insight Center* (KIC), ±55,9% responden melaporkan menemukan hoaks melalui Facebook, menunjukkan bahwa media sosial masih menjadi saluran utama temuan hoaks di Indonesia, sementara hoaks yang ditemui melalui berita daring mencapai sekitar ±16%. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa *platform* digital, khususnya media sosial, memainkan peran besar dalam distribusi hoaks di masyarakat Indonesia, dan bahwa perilaku *share without verification* serta rendahnya literasi digital berkontribusi pada cepatnya penyebaran informasi palsu. Dengan demikian, media sosial dan aplikasi pesan instan tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga arus dominan dalam penyebaran hoaks. Perbedaan persentase antara media sosial, aplikasi *chatting*, situs web, dan media konvensional menegaskan bahwa strategi penanggulangan hoaks perlu difokuskan pada literasi digital, penguatan kemampuan verifikasi informasi, dan pengawasan konten di *platform* daring untuk menekan penyebaran informasi palsu secara efektif.

Dinamika Penyebaran Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia

Penelitian Kartika dan Nurhayati (2023) mengkaji secara mendalam fenomena ujaran kebencian di *platform* digital dan bagaimana hal ini terkait dengan dinamika hukum serta perubahan sosial di masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta pendekatan hukum yang relevan. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan sehingga hasilnya mencerminkan gambaran nyata di lapangan. Penemuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa maraknya ujaran kebencian di ruang digital tidak terlepas dari rendahnya kemampuan sebagian pengguna dalam memilah dan menilai informasi secara kritis.

Dalam konteks ini, literasi informasi dipandang sebagai bagian integral dari literasi digital, di mana individu dengan tingkat literasi informasi yang tinggi memiliki kemampuan lebih baik dalam mengevaluasi kredibilitas sumber, menganalisis keakuratan konten, serta menahan diri untuk tidak langsung membagikan informasi yang belum diverifikasi. Pentingnya literasi informasi sebagai bagian integral dari literasi digital. Penelitian mereka menunjukkan bahwa individu

dengan tingkat literasi informasi yang tinggi memiliki kemampuan lebih baik dalam mengevaluasi kredibilitas sumber, menganalisis keakuratan konten, dan menahan diri untuk tidak langsung membagikan informasi yang belum diverifikasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital yang kuat dapat berfungsi sebagai filter psikologis terhadap informasi palsu, sehingga berperan signifikan dalam menekan penyebaran hoaks di media sosial (Kurniasih et al., 2024).

Sementara itu penelitian Siregar (2023) menyoroti hubungan antara literasi digital dan perilaku menghadapi ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital yang mencakup keterampilan mengakses, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis serta bertanggung jawab mampu menurunkan kecenderungan pengguna untuk menyebarkan konten negatif. Selain itu, literasi digital juga membantu individu memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka di ranah digital, sehingga memungkinkan terciptanya perilaku bermedia sosial yang lebih etis dan aman.

Cara Mengenali Berita Palsu (*Hoax*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Untuk mengenali hoaks dan ujaran kebencian, masyarakat perlu terus diberikan edukasi agar mampu secara sadar mengenali berita palsu dan ujaran kebencian yang saat ini masih banyak beredar di dunia maya. Langkah-langkah untuk mengenali *hoax* dan *hate speech* yaitu:

1. Cek siapa sumbernya, pastikan berita dari media resmi, lembaga terpercaya, atau akun resmi. Kalau anonim atau sumbernya tidak jelas, lebih hati-hati.
2. Bandingkan dengan sumber lain, cari tahu apakah berita yang sama muncul di media lain. Kalau cuma satu sumber yang memberitakan, kemungkinan itu hoaks.
3. Baca sampai habis, jangan cuma judul. Judul sering dibuat heboh agar diklik, tapi isinya bisa berbeda. Baca pelan-pelan dan pahami konteksnya.
4. Perhatikan kata-kata yang memancing emosi. Hoaks biasanya memakai kata yang bikin takut, marah, atau panik. Misalnya: “Awas!!!”, “Semua orang kena!”.
5. Pikir dulu sebelum percaya. Tanyakan pada diri sendiri: “Masuk akal nggak berita ini?” Kalau terlalu bombastis atau aneh, berhenti sejenak dan pikir kritis.
6. Periksa foto, video, dan tanggal berita. Hoaks sering pakai foto lama, editan, atau berita lama yang diputar ulang. Gunakan akal sehat dan kalau perlu cek foto via Google *Image*.
7. Hati-hati dengan pesan berantai dan URL. Pesan yang minta “sebar ke semua orang” atau link yang aneh/panjang biasanya hoaks.
8. Diskusi dan *cross-check* dengan orang lain. Tanya ke teman, keluarga, atau orang yang lebih paham. Pendapat lain bisa membantu menilai kebenaran berita.
9. Gunakan situs cek fakta dan jangan buru-buru *share*. Cek di situs terpercaya seperti, kominfo.go.id, atau situs cek fakta lainnya. Kalau belum yakin, lebih baik tahan dulu sebelum menyebarkan.
10. Perhatikan bahasa emosional atau provokatif. *Hate speech* biasanya menggunakan kata-kata yang memicu kemarahan, kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Faktor yang Mendorong Munculnya *Hoax* dan *Hate Speech* di Media Sosial

Berita *hoax* dan ujaran kebencian merupakan informasi palsu yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan oleh pihak yang membuatnya sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa konten *hoax* dan ujaran kebencian dapat tersebar secara luas di media sosial:

1. Upaya menjatuhkan pihak tertentu (*black campaign*)
Fenomena ini sering muncul terutama dalam konteks pemilihan umum, seperti Pilkada, Pilgub, Pileg, maupun Pilpres. Ambisi individu untuk memperoleh jabatan sering kali mendorong mereka menempuh berbagai strategi, termasuk cara-cara yang tidak etis, demi mencapai tujuan politik pribadi.
2. Menimbulkan keresahan di masyarakat.
Penyebaran informasi yang tidak benar dapat menciptakan ketidakstabilan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Beberapa pihak memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Strategi ini dapat diibaratkan sebagai “memanfaatkan kesempatan dalam kesulitan,” di mana kondisi sosial yang tidak menentu dijadikan peluang.
3. Tujuan mengadu domba.
Beberapa oknum sengaja menyebarkan konten *hoax* untuk memecah belah masyarakat atau kelompok tertentu. Strategi ini tidak selalu terkait dengan kepentingan politik atau materi secara langsung, namun lebih pada upaya menciptakan konflik atau ketegangan antara pihak-pihak yang berbeda. Dalam praktik politik, hal ini sering disebut sebagai politik adu domba.
4. Kurangnya literasi digital.
Banyak orang belum memahami cara mengecek kebenaran informasi di internet. Akibatnya, berita palsu atau ujaran kebencian mudah dipercaya dan diteruskan. Misalnya, di media sosial sering beredar foto atau video lama yang dikaitkan dengan berita baru untuk memprovokasi kemarahan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber penyebab lain munculnya *hoax* dan *hate speech* karena beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Kemudahan akses alat komunikasi *modern*.
Masyarakat memiliki *smartphone* dan akses internet yang luas, sehingga penyebaran informasi menjadi cepat dan mudah tanpa filter (Rahmadhany & Safitri, 2024; Surjatmodjo et al., 2024).
2. Kurangnya verifikasi informasi sebelum dibagikan.
Banyak pengguna langsung membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya tanpa melakukan pengecekan fakta (BMC Psychology, 2024).
3. Rendahnya minat membaca dan literasi masyarakat.
Rendahnya budaya membaca dan literasi informasi di Indonesia membuat masyarakat cenderung menerima informasi secara mentah tanpa mengevaluasi kebenarannya (Fauziyah et al., 2022).

Tindakan Hukum untuk Pelaku Penyebaran *Hoax*

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016. Pasal yang relevan:
 - a. Pasal 28 ayat (1) – Hoaks yang merugikan konsumen
Melarang penyebaran berita bohong yang merugikan masyarakat atau konsumen.
 - b. Sanksi: Pasal 45A ayat (1) Pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
 - c. Pasal 28 ayat (2) *Hate Speech* (Ujaran Kebencian berbasis SARA)
Melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan).

- d. Sanksi: Pasal 45A ayat (2) Pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
 - a. Pasal 27 ayat (3) – Pencemaran nama baik di media sosial
Sering digunakan dalam kasus “hoaks individu” atau tuduhan palsu terhadap seseorang.
 - e. Sanksi: Pasal 45 ayat (3) Pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Meskipun fokus utama pada UU ITE, KUHP juga dapat dipakai, terutama jika hoaks menimbulkan keresahan publik. Pasal yang sering digunakan:
- a. Pasal 14 dan 15 KUHP Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran
Pasal 14 ayat (1): menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran, pidana 10 tahun.
Pasal 14 ayat (2): menyebarkan berita tidak pasti, pidana 3 tahun.
Pasal 15: menyebarkan kabar yang belum pasti, pidana 2 tahun.
Ini sering dipakai pada kasus hoaks publik yang mengganggu ketertiban umum.
 - b. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Jika *hate speech* mengandung unsur ras atau etnis, maka aturan ini bisa digunakan.
Pasal 4 melarang tindakan yang memunculkan kebencian rasial.
Sanksi: Pidana penjara 5 tahun dan/atau denda hingga Rp500 juta.
 - c. UU No. 1 Tahun 1946 (Peraturan Pidana)
Mengatur berita bohong yang menimbulkan keonaran, sering dikombinasikan dengan KUHP dan UU ITE dalam kasus hoaks publik.

Upaya Menanggulangi *Hoax* dan *Hate Speech*

Ada beberapa cara untuk menanggulangi hoaks dan *hate speech*, di antaranya dengan meningkatkan literasi media dan literasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa literasi media digital berkorelasi positif dengan kemampuan individu dalam mengenali serta menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi palsu, karena literasi ini meningkatkan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi secara kritis (Illahi & Gani, 2024). Peningkatan literasi digital terbukti efektif dalam konteks krisis informasi seperti pandemi COVID-19, di mana kemampuan menyeleksi sumber dan memeriksa fakta membantu masyarakat menghadapi hoaks yang beredar di media sosial (Bahri, 2024).

Selain itu, literasi media berbasis digital juga menunjukkan dampak positif terhadap perilaku anti-hoaks di kalangan remaja dan pengguna umum, karena semakin tinggi literasi seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya sehingga mengurangi penyebaran berita palsu dan konten negatif (Mujiyanto & Nurhadi, 2025). Dengan demikian, literasi media dan digital menjadi kompetensi penting bagi masyarakat modern untuk menghadapi ledakan informasi di era digital yang berpotensi menyebabkan konflik, perdebatan, hingga disintegrasi sosial jika tidak disikapi secara kritis.

Masyarakat perlu diperlengkapi dengan kemampuan literasi digital dan media agar bisa menangkal hoaks dengan efektif. Orang yang punya kombinasi antara literasi media baru dan kemampuan berpikir kritis memiliki kemampuan lebih baik dalam mendeteksi berita palsu di media sosial.

Berdasarkan penelitian di Indonesia, salah satu strategi yang untuk menanggulangi hoaks adalah sosialisasi literasi digital secara luas agar publik dapat menyaring informasi dengan lebih cerdas dan tidak mudah tertipu. Rizana et al. (2023) menegaskan bahwa penguatan literasi digital yang dilengkapi pendidikan karakter penting untuk membangun kemampuan kritis masyarakat dalam menghadapi berita palsu di media sosial, sehingga mereka tidak langsung percaya pada konten yang belum jelas sumbernya.

Upaya edukasi bisa dilakukan lewat sekolah, komunitas, organisasi, bahkan lingkungan keluarga lewat pelatihan, penyuluhan, ataupun diskusi bersama. Sebagai contoh, ada program literasi digital untuk pelajar di mana mereka diajarkan cara memilah informasi, memverifikasi, dan memahami risiko menyebar konten palsu.

Penanggulangan hoaks bukan tugas satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, individu sebagai pengguna media, institusi pendidikan, komunitas sosial, serta media dan pemerintah untuk mendukung literasi secara berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat bisa mengolah informasi dengan lebih bijak, tidak langsung termakan isu, dan turut menahan penyebaran informasi palsu.

Penanggulan kepada korban *Hate Speech* dan *Hoax*

Paparan terhadap hoaks atau misinformasi tidak hanya memengaruhi pemahaman informasi, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental individu. Banyak literatur ilmiah menggarisbawahi perlunya intervensi psikologis dalam menghadapi dampak misinformasi, termasuk dukungan sosial dan layanan konseling digital, sebagai bagian dari strategi mitigasi (Van der Linden et al., 2023).

Penelitian ini mendukung gagasan bahwa program semacam “Ruang Pulih” diperlukan sebagai wadah pemulihan kondisi mental bagi korban hoaks, ujaran kebencian, atau informasi negatif lainnya agar mereka memiliki dukungan untuk mengelola stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan psikologis secara efektif. Dampak psikologis dari paparan *hate speech* menunjukkan peningkatan stres, kecemasan, dan rasa terancam di kalangan pengguna. Hal ini diperparah oleh karakteristik *platform* yang mempromosikan konten viral dan sensasional, sehingga konten yang menimbulkan kebencian atau provokasi politik mudah menyebar dan menguat di jaringan sosial (Soral et al., 2023).

Oleh karena itu “Ruang Pulih” dirancang sebagai wadah bagi korban untuk memulihkan kondisi mental mereka, khususnya bagi mereka yang terdampak oleh hoaks, ujaran kebencian, atau trauma sosial lainnya. Konsep ini muncul karena banyak penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap informasi palsu atau misinformasi dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, dan perasaan tidak aman

Ruang Pulih berfungsi sebagai tempat aman, baik secara fisik maupun virtual, di mana korban bisa mengekspresikan pengalaman dan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Selain menyediakan layanan konseling, ruang ini juga memungkinkan korban untuk mendapatkan edukasi literasi digital, sehingga mereka dapat mengenali dan menangkal informasi palsu di masa depan. Lebih dari sekadar konseling, Ruang Pulih juga mendorong terciptanya komunitas pendukung di mana korban dapat saling berbagi pengalaman dan dukungan emosional.

Program pemulihan mental berbasis peer-support telah menjadi pendekatan penting dalam intervensi kesehatan mental, terutama bagi individu yang mengalami trauma atau gangguan psikologis. *Peer support* sendiri merupakan bentuk dukungan

sosial yang diberikan oleh individu yang memiliki pengalaman serupa, sehingga mereka dapat saling memberikan nabati emosional, motivasi, dan strategi koping dalam konteks pemulihan (Smit et al., 2022). *Peer support* dalam konteks kesehatan mental telah terbukti memberikan kontribusi positif pada proses pemulihan personal dan klinis, termasuk pengurangan kecemasan dan peningkatan aspek *personal recovery* seperti harapan dan *self-efficacy* (*The effectiveness of peer support for individuals with mental illness*). *Peer support* juga dilaporkan mampu mendukung proses pemulihan mental individu dengan memberikan lingkungan sosial yang aman dan penuh empati, yang seringkali tidak tersedia dalam layanan kesehatan tradisional.

Individu yang memiliki trauma sangat membutuhkan dukungan teman sebaya, oleh karena itu dukungan sebaya tercatat sebagai komponen penting dalam pemulihan penyintas trauma. Sekerangka kajian *peer support for traumatic injury survivors* menunjukkan bahwa program *peer support* yang dilakukan dalam komunitas memberikan dukungan sosio-emosional yang berkelanjutan, rasa harapan, serta panduan dalam orientasi kehidupan pasca trauma. Program ini efektif ketika melibatkan mentor sebaya yang berpengalaman dan mempertahankan keterlibatan peserta, serta mampu mengatasi kendala seperti stigma dan kekhawatiran terhadap privasi (Wasilewski et al., 2023).

Penelitian Smit et al (2022) menunjukkan kombinasi bukti empiris ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif melalui *peer support* meningkatkan rasa aman dan mengurangi isolasi, kondisi yang sering dialami oleh korban trauma atau gangguan mental. Lingkungan *peer support* memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan pengalaman mereka tanpa takut dihakimi, sehingga memperkuat keterampilan sosial dan kesejahteraan mental. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa intervensi *peer support* mampu memberikan efek pada proses *personal recovery* serta meningkatkan rasa keterhubungan sosial yang merupakan komponen penting dalam pemulihan psikososial. Selain aspek pemulihan individu, dukungan komunitas yang inklusif dan jangka panjang memiliki potensi untuk memperkuat kesadaran kolektif terhadap dampak negatif hoaks dan ujaran kebencian, melalui pembangunan keterampilan evaluasi informasi dan literasi digital. Komunitas yang aman memungkinkan anggota belajar dari pengalaman satu sama lain tidak hanya dalam kesehatan mental tetapi juga dalam konteks digital, sehingga meningkatkan kemampuan kritis dalam memilah berita palsu dan ujaran kebencian. Meskipun studi awal seperti yang dikaji di atas lebih fokus pada aspek kesehatan mental dan pemulihan trauma, dasar hubungan sosial dan dukungan komunitas ini selaras dengan argumentasi bahwa dukungan sosial berkelanjutan, edukasi literasi digital, serta inklusivitas merupakan faktor kunci keberhasilan program seperti Ruang Pulih dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, program seperti Ruang Pulih dapat dipahami bukan hanya sebagai wadah pemulihan individu, tetapi juga sebagai strategi sosial yang berkontribusi pada penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan solidaritas komunitas. Dengan pendekatan tersebut, Ruang Pulih berpotensi menjadi upaya jangka panjang yang tidak hanya membantu individu pulih dari trauma, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi dampak negatif hoaks serta ujaran kebencian secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat *modern* sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi medium utama dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Tingginya intensitas penggunaan media sosial, disertai dengan kemudahan dalam menyebarkan informasi, menyebabkan hoaks dapat menyebar secara cepat dan luas di berbagai lapisan masyarakat.

Faktor utama yang mendorong maraknya penyebaran hoaks adalah rendahnya tingkat literasi digital dan literasi media masyarakat. Kurangnya kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi, serta kecenderungan pengguna untuk membagikan informasi berdasarkan emosi tanpa pengecekan fakta, menjadi penyebab utama penyebaran informasi palsu. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas informasi publik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan konflik di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penanggulangan hoaks tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penanganan hoaks harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, *platform* media sosial, hingga masyarakat sebagai pengguna aktif media digital.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah pertama, institusi pendidikan diharapkan dapat memperkuat program literasi digital dan literasi media dalam proses pembelajaran, baik melalui mata kuliah khusus maupun integrasi dalam berbagai disiplin ilmu. Upaya ini penting untuk membentuk kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menilai kebenaran informasi yang beredar di media sosial.

Kedua, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengendalian hoaks, serta mengoptimalkan peran lembaga siber dalam pengawasan dan penindakan terhadap penyebaran informasi palsu. Kerja sama antara pemerintah, media, dan *platform* digital juga perlu ditingkatkan guna menciptakan sistem pengawasan konten yang lebih efektif dan transparan.

Ketiga, masyarakat sebagai pengguna media sosial diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi. Sikap kritis, kebiasaan melakukan verifikasi sumber, dan tidak mudah terprovokasi oleh judul atau konten yang bersifat sensasional merupakan langkah penting dalam meminimalkan penyebaran hoaks. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem digital yang sehat, informatif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adeeb, R. A., & Mirhoseini, M. (2023). The impact of affect on the perception of fake news on social media: A systematic review. *Social Sciences*, 12(12), 674.

- [2] Aulia, F., & Subarsa Putri, K. Y. (2024). Use of Instagram as a medium for adolescence self-identity construction. *International Journal of Media and Communication Research*, 5(1), 33–43.
- [3] Azzaakiyyah, H. K. (2023). The impact of social media use on social interaction in contemporary society. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1(1), 1–9.
- [4] Bahri, A. (2024). Literasi digital sebagai strategi menangkal hoaks COVID- 19 di media sosial. *Jurnal Pendidikan dan Literasi Digital*, 3(2), 112–124.
- [5] Effendi, E. (2023). User behaviour and hoax information on social media: Case of Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(3), 930–943.
- [6] Fauziyah, R., Hardini, T. I., Sunendar, D., Yulianeta, Y., Kurniawan, K., & Halimah, H. (2022). Bahasa sebagai pemersatu bangsa: Eksistensi literasi digital dalam penangkal hoaks. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 22(1), 98–107.
- [7] Febriansyah, & Muksin, N. N. (2022). Media sosial sebagai arus utama penyebaran hoaks dan implikasinya terhadap budaya berbagi informasi di Indonesia. *Sebatik: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 26(2), 173–182.
- [8] Febriansyah, & Muksin, N. N. (2025). Fenomena media sosial: Antara hoax, destruksi demokrasi, dan ancaman disintegrasi bangsa. *Sebatik: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 24(2).
- [9] Fionda, V. (2025). Logic-based analysis of fake news diffusion on social media. *Social Network Analysis and Mining*, 15, Article 59.
- [10] Illahi, M., & Gani, E. (2024). Hubungan literasi media digital dengan kemampuan mengenali dan menahan penyebaran hoaks. *Jurnal Komunikasi dan Literasi Media*, 6(1), 45–58.
- [11] Kartika, D., & Nurhayati, N. (2023). Ujaran kebencian di ruang digital: Perspektif hukum dan perubahan sosial masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5(2), 145–158.
- [12] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan temuan hoaks di media sosial Indonesia (survei dan data Kominfo)*. Kominfo/Katadata Insight Center.
- [13] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia & Katadata Insight Center. (2022). *Status literasi digital di Indonesia 2022 [Laporan survei]*. Kominfo & KIC.
- [14] Kurniasih, E., Damayani, N. A., & Zubair, F. (2024). The role of information literacy in mitigating the spread of hoaxes on social media. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 12(1), 1–13.
- [15] Mujianto, & Nurhadi, N. (2025). Dampak literasi media berbasis digital terhadap perilaku anti-hoaks remaja. *Jurnal Media dan Komunikasi Digital*, 8(1), 1–14.

- [16] Rahmadhany, R., & Safitri, D. (2024). Pengaruh penggunaan smartpone dan internet terhadap perilaku penyebaran informasi di masyarakat. *Jurnal Komunikasi Digital dan Media Sosial*, 4(1), 22–34.
- [17] Ramdlani, M. F., Khoiriyah, H. A., & Lawal, U. S. (2024). Influence of social media on self-identity formation and the development of interpersonal ability in university students. *Education and Sociedad Journal*, 1(2), 73–82.
- [18] Rizana, R., Sari, N., & Putra, A. (2023). Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter sebagai strategi penanggulangan hoaks di media sosial. *Jurnal Pendidikan dan Literasi Digital*, 5(2), 67–79.
- [19] Sari, R. P., Boeriswati, E., & Anwar, M. (2025). Detecting hoax news on social media through pragmatic analysis. *International Seminar on Humanity, Education, and Language*, 1(1), 865–876.
- [20] Silalahi, R. R., & Sevilla, V. (2025). Rekonstruksi makna hoaks di tengah arus informasi digital. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).
- [21] Smit, D., Miguel, C., Vrijisen, J. N., Groeneweg, B., Spijker, J., & Cuijpers, P. (2023). *The effectiveness of peer support for individuals with mental illness: Systematic review and meta-analysis*. *Psychological Medicine*, 53(11), 5332–5341.
- [22] Smith, J., & Lee, A. (2024). Psychological factors influencing the sharing of unverified information on social media. *BMC Psychology*, 12, Article 85.
- [23] Siregar, M. R. (2023). Digital literacy and users' behavior in responding to hate speech on social media. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 7(1), 59–72.
- [24] Surjatmodjo, G., Unde, A. A., Cangara, H., & Sonni, M. (2024). Media digital, kecepatan informasi, dan tantangan literasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 9(2), 101–115.
- [25] Soral, W., Bilewicz, M., & Winiewski, M. (2023). Exposure to online hate speech and psychological distress among social media users. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 26(4), 245–252.
- [26] Van der Linden, S., Roozenbeek, J., Compton, J., Cook, J., & Lewandowsky, S. (2023). Psychological interventions countering misinformation in social media: A scoping review. *Nature Human Behaviour*, 7(6), 891–905.
- [27] Wasilewski, M. B., Rios, J., Simpson, R., Hitzig, S. L., Gotlib Conn, L., MacKay, C., Mayo, A. L., & Robinson, L. R. (2023). *Peer support for traumatic injury survivors: A scoping review*. *Disability and Rehabilitation*, 45(13), 2199–2232.